



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

## **Pembangunan Infrastruktur di Indonesia**

Disampaikan oleh :

**MENTERI PEKERJAAN UMUM**

pada acara

**Dialog Bersama Menteri Pekerjaan Umum**

Jakarta, 22 Agustus 2005

---

*Bapak Ibu, peserta Dialog Kadin yang saya hormati,*

*Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Salam Sejahtera bagi kita semua.*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT kami panjatkan karena hanya atas rahmat dan karuniaNya kita semua dapat berkumpul pada acara Dialog KADIN dengan tema **"Pembangunan Infrastruktur di Indonesia"**.

1. Visi Departemen Pekerjaan Umum dalam penyediaan infrastruktur adalah tersedianya infrastruktur PU yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis serta lebih sejahtera.
2. Peranan infrastruktur PU mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari proses produksi, pemasaran barang hasil produksi, sampai pada dukungan kepada masyarakat sebagai konsumen akhir. Infrastruktur Pekerjaan

Umum sebagai bangunan fisik seperti jaringan jalan, jaringan irigasi, air bersih, sanitasi dan berbagai bangunan pelengkap kegiatan permukiman lainnya merupakan modal sosial masyarakat sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi.

3. **Tantangan pembangunan infrastruktur PU** dalam mendukung agenda utama Kabinet Indonesia bersatu terutama: pertumbuhan ekonomi masih jauh dibawah 7%, sehingga belum memadai dalam mendukung penciptaan lapangan kerja baru, tingginya jumlah pengangguran, dan tingginya jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan.
4. **Tantangan Bidang Sumber Daya Air** : kerusakan sumber air, baik danau, waduk, embung, pencemaran air dan sumber air yang lain akibat pertumbuhan populasi, kebutuhan lahan permukiman dan industri; masih banyaknya jaringan irigasi yang tidak berfungsi baik; DAS kritis serta masih luasnya daerah rawan banjir.
5. **Tantangan Bidang Jalan dan Jembatan** :
  - Belum optimalnya kualitas pelayanan prasarana jalan, seperti masih banyaknya jalan rusak di jalur ekonomi; keterbatasan akses dari pusat - pusat produksi ke daerah pemasaran, *outlet* maupun ke perkotaan dan jalan lintas yang ada belum optimal mendukung pengembangan wilayah.
  - Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur ekonomi terutama di Lintas Timur Sumatera dan Pantura Jawa, yang disebabkan muatan dan dimensi berlebih, serta terbatasnya dana pemeliharaan. Hal tersebut mengakibatkan biaya operasi kendaraan dan biaya distribusi barang menjadi mahal dan tingkat kompetitifnya menurun.
  - Setelah 25 tahun dioperasikan, kemitraan Pemerintah dengan swasta baru menghasilkan jalan tol sepanjang 606 Km (hingga 2004), 76% dikelola PT. Jasa Marga dan 24 % oleh swasta. Hal ini antara lain dikarenakan permasalahan pembebasan tanah serta krisis ekonomi. Dari proyek-proyek jalan tol yang sedang ditawarkan kepada pihak swasta (6 ruas) ternyata 2 di antaranya tidak diminati investor .

- Terbaurnya peran jalan nasional yang melewati perkotaan yang mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas yang berdampak pada tingginya biaya ekonomi.
6. **Tantangan Bidang Infrastruktur Permukiman** terutama masih luasnya permukiman kumuh khususnya di perkotaan; pelayanan PDAM sebagai penyedia air bersih sebagian besar (sekitar 80%) tidak sehat, dengan sistem air bersih terbangun baru melayani 40% penduduk perkotaan, dan sistem pengolahan air limbah terpusat hanya pada 11 kota.
  7. **Arah kebijakan pengembangan infrastruktur PU 2005 -2009 dilaksanakan secara bertahap melalui Pendekatan Wilayah dengan piranti penataan ruang.** Kebijakan tersebut berpedoman kepada keserasian penanganan secara spasial (Nasional, Regional, Perkotaan, Perdesaan), sektoral (Jalan, Air, Infrastruktur Perumahan dan Permukiman), dan antar pemangku kepentingan (publik, swasta, dan masyarakat) dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan
  8. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan kondisi geografi dan demografi yang dikelompokkan dalam tiga kategori:
    - **Infrastruktur di Kawasan Telah Berkembang**, meliputi Pulau Jawa dan Pulau Sumatera relatif kegiatan ekonominya telah berkembang (81% ekonomi nasional) dengan dukungan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) barat (Selat Sunda – Laut Natuna). Pendanaan disamping Pemerintah terus didorong investasi swasta.
    - **Infrastruktur di Kawasan Mulai Berkembang**, meliputi Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan seluruh Nusa Tenggara Barat dengan di dukung ALKI tengah (Selat Lombok - Selat Makasar). Pertumbuhan ekonominya dicirikan oleh kegiatan baru yang mulai berkembang dan didorong pengembangan Jalan Lintas, dan kerjasama BIMP – EAGA. Pendanaan melalui kemitraan Pemerintah – Swasta semakin di dorong.
    - **Infrastruktur di Kawasan Pengembangan Baru**, meliputi kepulauan Maluku, Papua, dan seluruh Nusa Tenggara Timur, yang didukung oleh ALKI timur (Laut Arafuru – Laut Banda – Laut Maluku). Pengembangan sistem

Transportasi multimoda dan sumber daya Maritim, diprioritaskan dan pendanaan bertumpu pada Pemerintah Pusat / Daerah.

9. Kebijakan program jangka menengah 2005 – 2009 Departemen PU dalam **mendukung Agenda Kabinet Indonesia Bersatu adalah :**

- **Indonesia yang aman dan damai:**
  - Penanganan kawasan perbatasan, penanganan di daerah konflik dan akibat bencana alam melalui bantuan tanggap darurat untuk segera memfungsikan kembali infrastruktur yang rusak.
- **Indonesia yang adil dan demokratis :**
  - Penerapan prinsip – prinsip Good Governance, pelibatan peran serta masyarakat, penanganan daerah terisolir dan pulau terpencil.
- **Indonesia yang lebih sejahtera :**
  - **Pemantapan sistem jaringan jalan** mendukung pusat-pusat produksi, mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, mendukung kota sebagai Pusat Pelayanan Jasa Distribusi dan membentuk struktur kota; pemeliharaan dan peningkatan jalan arteri primer dengan prioritas jalur utama ekonomi; pengembangan jalan tol termasuk pengembangan berbagai skema pendanaan antara lain untuk Jalan tol lintas Jawa.
  - **Peningkatan sumber daya air mendukung Ketahanan Pangan** dengan menyeimbangkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dengan peran serta masyarakat; meningkatkan keandalan pasokan air dengan sistem korporasi wilayah sungai yang mengintegrasikan air permukaan dan air tanah; pengelolaan kualitas air dengan pendekatan satu sungai, satu rencana terpadu dan satu pengelolaan terkoordinasi dengan prinsip berkelanjutan; memulihkan fungsi layanan jaringan irigasi di 13 Pusat produksi pangan andalan dan penanganan prasarana pengendali daya rusak air.
  - **Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh, kawasan nelayan dan pembangunan perdesaan** dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengatasi kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur untuk membuka lapangan kerja dan

mengurangi biaya pengeluaran masyarakat; penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman sesuai kemampuan dan kondisi daerah ; pada daerah rawan air diupayakan pendanaan khusus seperti Subsidi Bahan Bakar; penyediaan air minum dan sanitasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat bertahap seiring MDG.

- **Peningkatan industri konstruksi** dengan mendorong penerapan UU Jasa konstruksi ; percepatan sistem registrasi, klasifikasi, dan sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Ahli;
  - **Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Bidang PU dilakukan dengan jalan** mengembangkan pola pendanaan dana masyarakat, swasta dan pemerintah secara terpadu; mendorong litbang dengan fokus pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; penyelesaian peraturan pemerintah di bidang Sumber Daya Air, Jalan dan Bangunan Gedung.
10. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur PU 5 tahun kedepan (2005 – 2009), secara keseluruhan diperlukan pendanaan sebesar Rp. 225 trilyun. Dari jumlah tersebut, Rp. 127 trilyun disediakan oleh Pemerintah termasuk BLN, dan sebesar Rp. 98 trilyun dari investasi swasta.
11. Pembangunan infrastruktur PU diarahkan mendukung investasi dengan sektor lain **melalui kemitraan Pemerintah dengan swasta** yang lebih efisien dan efektif, peningkatan daya saing dan profesionalisme bisnis. Adapun peluang investasi terbuka terutama pada **jalan dan air bersih**.

## **JALAN**

12. Dalam rangka peningkatan pelayanan jaringan jalan secara keseluruhan sedang dilakukan upaya sebagai berikut :
- Untuk mengatasi masalah pembiayaan dalam penanganan jalan diperlukan penerapan *Road Fund* (dana khusus untuk jalan), dimana pengguna jalan wajib turut membiayai pemeliharaan jalan atas jasa dan manfaat yang diterima langsung oleh pengguna jalan secara proporsional. Selanjutnya dapat dibentuk Badan/Lembaga Pemeliharaan Jalan yang bertugas menetapkan iuran/biaya pemakai jalan, membagi iuran yang terkumpul, dan melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pemeliharaan jalan.

Pada saat ini akan dikembangkan pengoperasian jembatan timbang sebagai salah satu bentuk implementasi *road fund* bekerja sama dengan Departemen Perhubungan.

- Untuk mengatasi penurunan kualitas pekerjaan penanganan jalan, perlu penerapan manajemen mutu yang dapat dilakukan melalui penerapan Sistem *Performance Based Contract* maupun Kontrak Jangka Panjang.
- Untuk mengatasi tuntutan akan perlunya dukungan prasarana jalan yang mampu dilalui beban 10 ton atau lebih agar efisien dan kompetitif, diperlukan tinjauan akan ruas-ruas yang dapat dilalui beban 10 ton atau lebih, serta upaya koordinasi penegakan hukum maupun kerjasama dengan Departemen Perindustrian mengenai beban dan dimensi kendaraan.
- Dalam rangka efisiensi pemanfaatan bantuan luar negeri, diperlukan pendekatan penanganan melalui pengembangan wilayah, seperti pada "*Eastern Indonesia Regional Road Project*", yang merupakan operasionalisasi penataan ruang.

13. Perluasan daerah perkotaan yang cepat dan terbaurnya fungsi jalan nasional yang melalui perkotaan perlu diikuti penataan terutama :

- Pembangunan jalan baru (*bypass*) maupun jalan lingkar hendaknya diikuti penatagunaan lahan dan penegakan hukum disepanjang jalan tersebut.
- Penerapan teknologi seperti *Intelligent Transportation System* (ITS) yang dipadukan dengan manajemen lalu lintas untuk meningkatkan kapasitas jalan.
- Untuk kota metropolitan perlu pengembangan *Mass Transit* yang dapat pula dipadukan dengan pembangunan jalan.
- Dengan banyaknya jalan-jalan arteri dalam kota yang menurun tingkat pelayanannya akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi jalan, maka perubahan penggunaan lahan perlu mendengar pertimbangan dari penyelenggara jalan. Untuk itu diperlukan penataan ruang kawasan jalan arteri primer.

14. Dalam upaya mempercepat pembangunan jalan, telah dilakukan reformasi peraturan perundang-undangan melalui UU 38/2004 terutama pengaturan wewenang penyelenggaraan jalan tol oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); operator jalan tol lebih di buka pada BUMN, BUMD atau BUMS; ruas jalan tol, tarif dan penyesuaiannya dilakukan Menteri PU; dilakukan pelelangan secara terbuka dan transparan, serta diterbitkan Rencana Induk Jaringan Jalan Tol sebagai acuan investasi.

15. Biaya dan ketersediaan lahan adalah resiko utama dalam proyek jalan tol oleh karena itu penting bagi Pemerintah melakukan pembebasan lahan sebelum penandatanganan konsesi untuk menarik minat investor yang juga berkaitan dengan syarat perbankan. Ketersediaan tanah di awal pembangunan ini merupakan faktor penentu dapat diselesaikannya dengan cepat pembangunan jalan tol Cipularang. Upaya yang dilakukan adalah diterbitkannya Perpres 36 tahun 2005 tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
16. Untuk mengatasi dan memperluas sumber pendanaan, sedang / telah dikembangkan berbagai alternatif pendanaan jalan tol yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, serta memiliki mekanisme diversifikasi resiko antara lain :
- Untuk proyek-proyek yang secara finansial dan ekonomi layak dilakukan tender investasi dengan pola *Built Operate and Transfer* (BOT).
  - Alternatif lain apabila secara ekonomi layak tapi finansial kurang layak dapat sebagian dibiayai pemerintah atau melalui Sumber dana pinjaman luar negeri atau APBN untuk membangun jalan Tol dan setelah selesai baru dilakukan tender pengoperasian maupun pemeliharaan.
  - Pembentukan Dana Investasi Infrastruktur Jalan Tol (DIIJT) yang merupakan dana kelola Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) yang diatur sesuai ketentuan UU Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM untuk menjaring investor.
  - Penggunaan pola *Contractor Pre Financing* (CPF) seperti pada ruas Cikampek-Padalarang Tahap II, dimana kontraktor mendanai terlebih dahulu, dan setelah selesai PT Jasa Marga membayar biaya konstruksi berikut bunga dengan dana pinjaman, sehingga pinjaman PT Jasa Marga dapat dibukukan kemudian.
17. Bagi investor, pengusahaan jalan tol pada dasarnya harus layak secara finansial dan *bankable* yaitu : *self financing*, memberi *return* yang wajar pada investor serta resiko terkendali dan memenuhi persyaratan perbankan. Untuk itu sedang dicanangkan percepatan pembangunan jalan tol tahun 2005 – 2009 yang meliputi 1642 km jalan tol di Pulau Jawa sedangkan diluar Pulau Jawa sepanjang 56 km dengan total kebutuhan investasi sekitar Rp. 94,5 trilyun.

## **AIR BERSIH**

18. Untuk sektor air bersih, sebagian besar PDAM bermitra dengan pihak swasta termasuk untuk penurunan kehilangan air melalui kontrak servis (pemeliharaan pipa, pembacaan meter, penagihan rekening serta peningkatan dan kalibrasi meter air); meningkatkan efisiensi Instalasi Pengolahan Air melalui kontrak servis dan manajemen; peningkatan kapasitas baru melalui kontrak BOT dan BOOT; serta konsesi penuh.
19. Dalam mendukung kemitraan dengan swasta dalam penyediaan air bersih, sudah terbentuk **Badan Pengatur** SPAM untuk menjamin berfungsinya perusahaan penyedia air bersih dan juga kualitas pelayanannya.
20. Peluang investasi air minum terbuka untuk 20 kota/kabupaten dengan total kapasitas 14.970 liter/detik dengan kebutuhan total investasi sekitar Rp. 3,5 triliun, antara lain di kota Pekanbaru, Dumai, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta.
21. Melalui sinergi Pemerintah dengan KADIN diharapkan terwujudnya pembangunan infrastruktur secara lebih cepat dan lebih baik terutama dalam pemenuhan target investasi swasta.

**Wassalaamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh**

**Menteri Pekerjaan Umum**

**Djoko Kirmanto**